

# ***E-READINESS* DALAM PENERAPAN *E-PLANNING* DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA**

Oleh

**Nesty Epa<sup>1</sup>,  
Sampara Lukman<sup>2</sup>, Ella Wargadinata<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah

<sup>2)</sup> Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
ria\_epa@yahoo.com

<sup>2,3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

## **ABSTRACT**

**T**he purpose of this research is to see the E-Readiness Mamberamo Tengah District in implementing E-Planning. Geographically, Mamberamo Tengah district has limited access but it is required to progress as any other districts in Indonesia. This research will elaborate on any existing condition and requirements that need to be fulfilled by Mamberamo Tengah District to implement E-planning.

This is a qualitative research. Method used in measuring e-readiness is e-readiness method developed from variable relationship by Musa (2010). Indicators that is included into the measurement tool of e-readiness framework contain of three factors which is technology, human resources and institutional factors particularly at the local level (regional government).

The result of this e-readiness measurement showcased the unpreparedness of Mamberamo Tengah district to implement e-planning whether by looking at the technology, human resources or institutional side. Therefore it should become government's attention to develop needed infrastructure, build cooperation between government, private sector and the community and last but not least develop specific regulation on Regional Planning Information System/Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) so that in the future the E-Planning can be implemented more effectively and efficiently based on the regulation.

**Keywords:** E-readiness, E-planning, Mamberamo Tengah District

## **ABSTRAK**

**P**enelitian ini bertujuan untuk mengukur E-Readiness Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Penerapan E-Planning. Kabupaten Mamberamo Tengah secara geografis termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses, namun Di sisi lain harus melakukan inovasi yang tidak biasa untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Penelitian ini akan membahas eksisting kondisi serta syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menerapkan pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengukur e-readiness yaitu metode e-readiness yang dikembangkan dari model hubungan variabel e-readiness menurut Musa (2010). Indikator-indikator yang diintegrasikan ke dalam kerangka pengukuran e-readiness dalam tool dipetakan ke dalam tiga faktor penting yang memengaruhi

*e-readiness* yaitu faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional khususnya di tingkat lokal (pemerintah daerah).

Hasil pengukuran *e-readiness* menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah belum siap dalam menerapkan *e-planning* baik diukur dari faktor teknologi, faktor manusia maupun faktor institusional, sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur dan juga pemerintah daerah perlu membangun kerja sama antarpemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat serta perlu adanya regulasi yang secara khusus berbicara tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) agar lebih baik ke depannya dan pelaksanaan *e-planning* dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien.

**Kata kunci:** *E-readiness, E-planning, Kabupaten Mamberamo Tengah*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengimplementasikan sistem *e-government*, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Di mana sistem *e-government* ini menggunakan kemajuan teknologi dan komunikasi, yang pada dasarnya penerapan *e-government* ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan secara *online*. Implementasi *e-government* ini juga memudahkan pemerintah dalam menyinkronkan data dari pusat hingga daerah serta melalui sistem ini masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan juga mengontrol pekerjaan pemerintah.

Pelaksanaan *e-planning* di Indonesia saat ini sangat membantu dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dalam penerapan *e-planning* ini sangat membantu dan mempermudah pemerintah dalam menyinkronkan data perencanaan pembangunan dari tingkat pusat, selanjutnya daerah provinsi kabupaten/kota. Pelaksanaan *e-planning* di beberapa daerah memiliki keterbatasan dalam penerapannya ditinjau dari beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, komitmen pemangku kebijakan, dan sistem informasi dari *e-planning* itu sendiri (Sani, Balgi, 2017).

Penerapan *e-government* di setiap

daerah memiliki kendala dan masalahnya masing-masing oleh karena itu perlu adanya *e-readiness* dalam mengukur kesiapan suatu daerah. Berdasarkan berbagai penelitian menyatakan bahwa kesiapan suatu daerah dalam menerapkan *e-government* memiliki masalahnya masing-masing tergantung situasi, kondisi dan juga letak geografis. Adapun masalah yang dihadapi sekarang adalah sebagai berikut. 1) Analisis Kesiapan Kota Cerdas; 2) Model *E-Readiness* untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan *Smart Government* Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo; 3) *E-Readiness* Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan *E-Government* (Studi terhadap Kepri *Smart Province*); dan 4) Kajian Teoretis: Model *E-Government Readiness* Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keberhasilan *E-Government*. Penelitian-penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi *e-readiness* di setiap daerah di antaranya:

- a) Kesiapan masyarakat, karena partisipasi dan kepercayaan masyarakat serta penguasaan Pendidikan dan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat penting dalam penerapan *E-Government*;
- b) Faktor teknologi, ini juga ikut memengaruhi karena ketersediaan, kehandalan, ketercakupannya internet serta anggaran sangat menunjang untuk keberhasilan dalam penerapan *E-Government*. serta;

- c) Faktor kelembagaan, di mana kebijakan anggaran, kebijakan program dan instrumen hukum sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu kebijakan sistem *E-Government*.

Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru yang sulit dijangkau, maka perlu mempersiapkan segala perencanaan pembangunan guna mengembangkan infrastruktur di daerah. Perencanaan Pembangunan di daerah Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 14 menyebutkan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*. Dengan ini maka pemerintah perlu menggunakan metode *e-readiness* dalam mengukur kesiapan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah karena terkait dengan pelaksanaan *e-government* ini membutuhkan kesiapan dari berbagai faktor untuk menunjang terwujudnya *e-planning*.

Dengan kondisi geografis yang sulit, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Penerapan *e-government* di daerah terisolir justru dapat meningkatkan kinerja karena Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan membangun komunikasi dengan daerah lainnya dengan lebih mudah, cepat dan tepat.

Kabupaten Mamberamo Tengah termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses, namun Di sisi lain harus melakukan inovasi yang tidak biasa untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya.

Penelitian ini ditunjukkan untuk melihat kesiapan Kabupaten Mamberamo Tengah, di dalam istilah akademis disebutkan sebagai *e-readiness* dalam penerapan *e-planning*. Penelitian ini akan membahas eksisting kondisi serta syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menerapkan pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik.

### Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan daerah otonom baru, di mana masih perlu mempersiapkan perencanaan pembangunan dan infrastruktur;
2. Pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki keterbatasan akses infrastruktur, dan
3. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki keinginan untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan perencanaan berbasis elektronik/*e-planning*.

### Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning*. Sementara itu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning*. Kabupaten Mamberamo Tengah ini merupakan daerah otonom baru yang berada di daerah Pegunungan Tengah di mana akses ke daerah ini cukup sulit, sehingga perlu adanya *e-readiness* infrastruktur pemerintahan secara efektif dan efisien.

## TEORI YANG DIGUNAKAN

Pengembangan *e-government* menyimpan potensi yang sangat besar, potensi ini harus mampu membawa semangat bagi pemerintah daerah untuk mentransformasikannya menjadi sebuah program penting yang mendukung reformasi administrasi, sosial, dan ekonomi, yang kesemuanya itu berorientasi pada memfasilitasi faktor-faktor keberhasilan *e-government* itu sendiri, dan terlebih lagi untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diambil masyarakat dari transformasi *e-government* yang dilakukan (Musa, 2010).

Dalam upaya menghindari atau setidaknya meminimalisir kegagalan tersebut, penerapan *e-government* harus dimulai dengan membentuk kesiapan diri suatu organisasi, yang mana tingkat kesiapan tersebut ditunjukkan dari hasil pengukuran *e-readiness*. Selanjutnya, efektivitas hasil pengukuran *e-readiness* ditentukan oleh seberapa efektif suatu organisasi mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya, menetapkan faktor dan indikator *e-readiness* yang relevan. Untuk itu, mempelajari situasi yang berkembang di tingkat nasional dan regional menjadi faktor penting dalam penetapan indikator dan faktor-faktor terkait.

Kesiapan Elektronik (*E-Readiness*) merupakan kesiapan mental atau fisik suatu organisasi untuk suatu pengalaman atau tindakan *e-learning* (Priyanto, 2008). *E-Readiness* juga diartikan tingkat di mana masyarakat diarsipkan untuk partisipasi dalam teknologi yang dapat membantu untuk membangun menuju masyarakat yang lebih baik (Waryanto, 2010). *E-Readiness* merupakan tingkat di mana masyarakat siap untuk mendapatkan keuntungan yang bisa didapatkan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Penulis *e-readiness* merupakan suatu metode yang digunakan untuk

mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan *e-government* dan internet merupakan fasilitator utama dalam menunjang keberhasilan kebijakan. *E-readiness* sangat membantu pemerintah dalam mengukur kesiapan daerah agar pemerintah akan lebih terarah dalam perencanaan pembangunan menuju pada *good governance*.

Penetapan indikator dan faktor-faktor *e-readiness* yang relevan akan mengarahkan pada adaptasi sebuah model atau *tool e-readiness* yang sesuai untuk konteks atau regional daerah tertentu. *Tool* ini harus sederhana dan mudah untuk digunakan dan konsisten dengan realitas lingkungan pemerintahan tertentu. *Tool* ini harus mengukur beberapa aspek yang dipandang penting bagi suatu daerah di mana *e-government* tersebut akan diterapkan, yang mana kondisi yang dihadapi oleh setiap daerah berbeda satu sama lainnya.

*Tool* tersebut mengukur aspek-aspek tertentu dari masyarakat dan beberapa fitur layanan dan teknologi yang diperlukan dalam transformasi penyelenggaraan pemerintahan dan sistem konvensional ke arah digital. Pada dasarnya *tool* ini dimaksudkan untuk memberikan indikasi terbaik tentang variabel yang memengaruhi *e-government* sehingga hasil pengukuran tersebut dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan apa saja yang patut menjadi prioritas dan perbaikan apa yang krusial harus dilakukan dalam meningkatkan *e-readiness* dari suatu kabupaten.

Berdasarkan analisis ini maka Musa menetapkan sejumlah indikator yang diusulkan sebagai instrumen pengukuran *e-readiness* di tingkat pemerintah daerah dan dapat dikembangkan untuk pemerintah daerah negara-negara berkembang lainnya. Indikator-indikator tersebut dipetakan ke dalam tiga faktor penting yang memengaruhi *e-readiness*, yaitu sebagai berikut.

Faktor Teknologi	Faktor Manusia	Faktor Institusioanl
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan (<i>availability</i>)</li> <li>• Keandalan (<i>Reliability</i>)</li> <li>• Penetrasi internet (ketercakupan)</li> <li>• Biaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan terhadap pemerintah</li> <li>• Partisipasi masyarakat</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kompetensi TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Online service</i></li> <li>• Integrasi</li> <li>• <i>Willingness (political will)</i></li> <li>• Kebijakan anggaran</li> <li>• Kebijakan program</li> <li>• Instrumen hukum</li> </ul>

Sumber: Model hubungan variabel *e-readiness* (Musa,2010)

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada tahapan desain penelitian *e-readiness* penerapan *e-planning* menggunakan model hubungan variabel *e-readiness* dari Musa (2010). Dalam upaya menyiapkan penerapan *e-government* harus dimulai dengan membentuk kesiapan harus diri dari suatu kabupaten yang mana tingkat kesiapan tersebut dapat dilihat dari hasil pengukuran *e-readiness*.

### Data yang Diperlukan

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka perlu diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut.

1. Manusia, yaitu mereka yang terlibat dan melibatkan diri dalam proses kegiatan dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama informan;
2. Sumber Data Tertulis, berupa buku atau dokumen, arsip-arsip dan surat-surat penting yang berhubungan dengan penelitian;
3. Data tidak tertulis yaitu kata-kaya atau tindakan yang terjadi saat melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan

peneliti untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat berupa buku seperti Mamberamo Tengah Dalam Angka, Indeks Kepuasan Masyarakat, arsip seperti surat Rencana Aksi KPK, Keputusan Bupati dan juga Peraturan Daerah serta ada juga dokumen pribadi seperti foto-foto wawancara dan juga sarana dan prasarana kantor yang memengaruhi *e-readiness* penerapan *e-planning* di Bappeda.

### Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

#### 1. Wawancara

Peneliti langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Peneliti melakukan dengan berhadapan dengan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi mengenai *e-readiness* dalam penerapan *e-planning*, apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang



dilakukan dalam *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning*.

## 2. Observasi

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian untuk mendapat gambaran secara menyeluruh tentang penyaksian terhadap seluruh peristiwa-peristiwa kemudian dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga dapat menggambarkan sasaran yang diteliti yaitu faktor-faktor yang memengaruhi serta upaya yang dilakukan dalam *e-readiness* dalam penerapan *e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa fasilitas pelayanan kantor seperti genset, solarsel, jaringan *wifi* (internet) dokumen publik, seperti laporan kemajuan pelaksanaan *e-planning* di Mamberamo Tengah dari tahun 2017, 2018 dan 2019, dan juga termasuk di dalamnya ada peraturan daerah yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ***E-Readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penerapan *E-Planning***

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan terhadap tiga faktor yang terkait dalam *e-readiness* penerapan *e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua yaitu faktor teknologi, manusia, dan institusional. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Faktor Teknologi

Faktor teknologi sangat memengaruhi *e-readiness* karena ketersediaan, kehandalan, ketercakupan internet serta anggaran sangat menunjang untuk keberhasilan dalam penerapan

*e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah. Ketersediaan sarana dan prasarana baik jaringan internet, komputer, genset serta solarsel sudah tersedia tetapi belum berjalan secara efektif dan efisien karena sering mengalami gangguan jaringan dan juga pasokan bahan bakar minyak (BBM) terbatas, sehingga masih banyak yang harus disiapkan dan ditingkatkan agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### 2. Faktor Manusia

Faktor manusia juga sangat memengaruhi *e-readiness* karena ketersediaan, kehandalan, ketercakupan internet serta anggaran sangat menunjang untuk keberhasilan dalam penerapan *e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah. Pemerintah daerah secara bertahap mempersiapkan pegawai dalam pengembangan potensi serta keterampilan pegawai dalam pendidikan formal maupun nonformal. Secara khusus pegawai disiapkan dan diikutsertakan dalam pelatihan teknik informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi pegawai dalam menggunakan komputer dan juga mengelola sistem aplikasi.

#### 3. Faktor Konstitusional

Faktor konstitusional sangat memengaruhi *e-readiness* karena kebijakan anggaran, kebijakan program dan instrumen hukum sangat berpengaruh terhadap kelancaran serta keberhasilan penerapan *e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah. Penerapan *e-planning* belum memiliki regulasi daerah yang mengatur tentang SIPD karena pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Rencana Aksi KPK yang tertuang dalam Keputusan Bupati Mamberamo Tengah No. 31 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pencegahan

Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah 2017-2018. Pelayanan di Kabupaten Mamberamo Tengah masih secara *offline*, dan data perencanaan daerah belum terintegrasi dari tiap-tiap OPD terutama *e-planning* dan *e-budgeting*. Untuk kebijakan program dan kebijakan anggaran *e-readiness* penerapan *e-planning* telah dianggarkan dalam APBD 2017, 2018 dan 2019.

### **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang Memengaruhi E-Readiness dalam Penerapan E-Planning di Kabupaten Mamberamo Tengah**

*E-Planning* pada dasarnya memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses internet sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem aplikasi pemerintahan secara efektif, efisien, transparan serta terintegrasi dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten. *E-Readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning*, memiliki faktor-faktor pendukung dan juga faktor-faktor penghambat dalam penerapannya sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien. Adapun faktor-faktor pendukung dalam *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning* antara lain:

1. Pemerintah daerah merespons secara positif penerapan *e-planning* di Bappeda dengan menganggarkan dalam APBD tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Tengah No. 31 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2017-2018;
2. Pemerintah daerah membangun infrastruktur teknologi dalam hal ini jaringan internet dengan kapasitas 4 Mbps khusus untuk Bappeda dan menggunakan genset serta solarsel sebagai sumber listrik;

3. Bappeda juga mempersiapkan setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal untuk meningkatkan potensi pegawai;

Adapun faktor-faktor penghambat dalam *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning* antara lain sebagai berikut.

1. Belum adanya regulasi sebagai payung hukum dari pemerintah daerah dalam penerapan *e-government* secara khusus *e-planning*. Regulasi sangat penting dalam menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan *e-government* karena perlu adanya kebijakan *e-government* terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah;
2. *E-Readiness* penerapan *e-planning* belum maksimal karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mempersiapkan penerapan *e-planning* serta terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika;
3. Belum terintegrasinya data antarinstansi pemerintahan dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten;
4. Belum adanya pembangkit listrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga tiap instansi menggunakan genset atau solarsel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tiap instansi .
5. Perlu adanya forum rutin antarinstansi pemerintahan khususnya pegawai di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah tentang pentingnya *e-readiness* penerapan *e-planning*.

### **Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penerapan E-Readiness Penerapan E-Planning**

Upaya-upaya pemerintah dalam *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah

dalam penerapan *e-planning* adalah sebagai berikut.

1. Membuat Regulasi atau payung hukum yang mengatur secara khusus tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD);
2. Membangun kerja sama dengan Kemkominfo dalam pembangunan Palapa Ring di Gunung Mega yang berada di antara Kabupaten Mamberamo Tengah dan kabupaten Tolikara;
3. Membangun kerja sama dengan Kabupaten Jayawijaya dalam membangun sistem aplikasi *e-planning* di Bappeda Kabupaten Mamberamo Tengah;
4. Memberikan pendidikan formal dan nonformal bagi pegawai Bappeda dalam meningkatkan potensi pegawai;
5. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pendidikan dan pelatihan SDM secara khusus di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam menunjang *e-readiness* penerapan *e-planning*.
6. Mengadakan sosialisasi atau forum secara rutin antarinstansi pemerintahan untuk membahas pengembangan *e-government* secara khusus *e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan *E-Readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *E-Planning* maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *E-Readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning* dilihat dan diukur dari tiga faktor yaitu faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional. Dari ketiga faktor ini dapat disimpulkan bahwa

Kabupaten Mamberamo Tengah belum siap menerapkan *e-planning* karena pemerintah daerah masih perlu dan masih banyak yang harus dipersiapkan baik dari segi teknologi, manusia maupun institusional agar dapat menerapkan *e-planning* secara efektif, efisien, transparan dan juga terintegrasi.

2. Adanya faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning*. Faktor pendukung yaitu
  - a. Pemerintah daerah merespons baik aksi KPK mengenai penerapan *e-planning* di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan menganggarkan dalam APBD Bappeda tahun 2017, 2018 dan 2019;
  - b. Pengadaan Jaringan Internet yaitu wifi dengan kapasitas 4 Mbps;
  - c. Bappeda mempersiapkan setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka peningkatan potensi pegawai.
3. Faktor penghambat dari *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning* yaitu
  - a. Belum adanya regulasi sebagai payung hukum dari pemerintah daerah dalam penerapan *e-government* secara khusus *e-planning*;
  - b. Rendahnya kualitas atau potensi Sumber Daya Manusia dalam mengelola dan mempersiapkan penerapan *e-planning* serta terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika;
  - c. Belum adanya pembangkit listrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga di Kabupaten Mamberamo



- Tengah menggunakan genset dan juga solarsel sebagai sumber listrik;
- d. Belum terintegrasinya data antarinstansi pemerintahan dari tingkat kampung, distrik hingga instansi di kabupaten;
  - e. Belum adanya forum rutin antarinstansi dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan *e-planning* di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning* antara lain:
    - a. Membangun kerja sama dengan Kemkominfo dalam pembangunan Palapa Ring di Gunung Mega yang berada di antara Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Tolikara;
    - b. Membangun kerja sama dengan Kabupaten Jayawijaya dalam mempersiapkan sistem aplikasi *e-planning*;
    - c. Memberikan pendidikan formal maupun nonformal bagi pegawai Bappeda dalam rangka meningkatkan potensi pegawai.

### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti juga mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam penerapan *e-planning*;
2. Perlu adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang secara khusus berbicara tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) agar pelaksanaan *e-planning* di Bappeda Mamberamo Tengah dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara efektif dan efisien;

3. Perlu adanya kerja sama dari semua pihak antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat untuk *e-readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penerapan *e-planning*.

4. Perlu adanya forum rutin antarinstansi pemerintahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah tentang *e-readiness* penerapan *e-government* secara khusus *e-planning*.

### KAJIAN PUSTAKA

- Creswell, John. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*. Indra Prahasta.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *kebijakan publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Indrayani Etin, 2015. *E-Government, Konsep, implementasi dan Perkembangan di Indonesia*.
- Nazir.Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Sumaryadi, 2006. *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*
- Sumanto Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. Center of Academic Publishing Service (CAPS). Yogyakarta. 2014.
- Patarai Idris, 2015. *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*. De la macca. Makassar.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Permen No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Mamberamo Tengah No. 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keputusan Bupati Mamberamo Tengah No. 31 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2017-2018.

## Jurnal

Vikram Singh, Subhash Chander, Sunil Kumar, 2009, Impact of *E-Governance* Among Rural & Urban Areas of Punjab, *conference Paper*.

Dugdale, Daly, Papandrea, Maley, 2005, *Accessing e-government: challenges for citizens and organizations*, *International Review of Administrative Sciences*.

## Website

http: //lestarinurbudi.wordpress.com/2016/03/29/pengertian-dan-penjelasan-e-government/.

http: //www.jmc.co.id/blog/detail/E-Planning-Memudahkan-Kinerja-BAPPEDA-di-Seluruh-Indonesia.

http: //www.bangda.kemendagri.go.id/berita/baca\_kontent/1077/penerapan\_aplikasi\_e-planning\_dalam\_perencanaan\_pembangunan\_daerah\_dan\_simda\_sebagai\_alternatif\_aplikasi\_penilaian\_kinerja\_instansi\_pemerintah\_daerah.

http: //www.jmc.co.id/blog/detail/E-Planning-Memudahkan-Kinerja-BAPPEDA-di-Seluruh-Indonesia.